
Vocational Training: Perannya Dalam Memutus Rantai Kemiskinan

Ahmad Abni ¹, Ahmadin ², Bakhtiar ³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: abni21ajeng29@gmail.com ¹, ahmadin@unm.ac.id ², bakhtiar@unm.ac.id ³

Article History:

Received: 11 Mei 2025

Revised: 31 Mei 2025

Accepted: 09 Juni 2025

Keywords: vokasional training, kemiskinan, pemberdayaan, studi literatur.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas program vocational training dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal akademik, kebijakan pemerintah, dan berita dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025), penelitian ini mengkaji tantangan, praktik terbaik, serta dampak dari pelatihan vokasional. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi dan sintesis tematik, didasarkan pada tiga kerangka teori utama: Teori Modal Manusia, Teori Pemberdayaan, dan Teori Struktural Fungsionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan vokasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan, pendapatan, dan pemberdayaan kelompok rentan. Program ini juga terbukti efektif ketika dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan. Namun, tantangan seperti kesenjangan akses, stigma sosial, dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri masih menjadi hambatan utama. Studi ini merekomendasikan adopsi praktik terbaik dari daerah dan negara lain sebagai rujukan untuk memperkuat strategi pelatihan vokasional di Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang tidak pernah redup dalam setiap isu sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia adalah soal kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menyangkut kurangnya penghasilan bagi masyarakat, tetapi mencakup terbatasnya akses pendidikan, pelayanan dasar dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurut kajian ilmu sosial, kemiskinan dipetakan menjadi dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan struktural. Adanya kemiskinan kultural dikarenakan pola pikir, dan kebiasaan yang terwariskan dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghambat perkembangan dan peningkatan taraf hidup mereka. Pada sisi lain, kemiskinan struktural terjadi karena ketimpangan ekonomi, politik dan sosial yang disebabkan oleh terbatasnya akses pada sumber daya dan kesempatan untuk maju.

Secara filosofis, kemiskinan berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial. Dalam pemikiran John Rawls tentang "justice as fairness" keadilan harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Di Indonesia, nilai keadilan sosial tercermin dalam Pancasila, terutama sila ke-5, yang menegaskan bahwa kesejahteraan harus merata bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam menangani kemiskinan, diperlukan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan individu agar mereka dapat keluar dari jerat kemiskinan.

Secara sosiologis, kemiskinan dipahami sebagai hasil dari ketimpangan sosial yang berakar pada sistem masyarakat. Menurut teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons, kemiskinan dapat terjadi akibat ketidakseimbangan dalam sistem sosial, di mana kelompok tertentu mengalami marginalisasi dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Sementara itu, dalam perspektif teori konflik Karl Marx, kemiskinan struktural terjadi karena eksploitasi ekonomi oleh kelompok yang lebih dominan, sehingga menciptakan ketimpangan yang semakin dalam.

Di sisi lain, kemiskinan kultural berkembang karena adanya pola pikir yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti rendahnya motivasi untuk berwirausaha, ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus mencakup pemberdayaan sosial dan perubahan budaya dalam komunitas miskin agar mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Dari perspektif hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menangani kemiskinan. Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai kebijakan dan program bantuan sosial.

Selain itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, regulasi yang ada masih lebih banyak berfokus pada aspek struktural, sementara kemiskinan kultural memerlukan intervensi yang lebih berbasis pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perubahan pola pikir masyarakat.

Salah satu strategi mengatasi kemiskinan dalam berbagai konteks negara berkembang adalah vocational training atau pelatihan vokasional. Vocational training menekankan pada pengembangan keterampilan teknis dan praktis yang dibutuhkan oleh dunia kerja, serta meningkatkan daya saing individu dalam pasar tenaga kerja. Melalui pelatihan ini, individu dari kelompok rentan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau bahkan menciptakan usaha mandiri.

Pelatihan vokasional memiliki dimensi sosial dan psikologis, seperti meningkatkan kepercayaan diri, mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, dan membentuk budaya kerja yang positif. Dengan demikian, vocational training tidak hanya berfungsi sebagai alat intervensi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang dapat mengatasi kemiskinan.

Mengingat pentingnya peran pelatihan vokasional dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan, diperlukan kajian pustaka yang menyeluruh untuk memahami sejauh mana efektivitas program ini, apa saja tantangannya, dan bagaimana praktik terbaik di berbagai negara atau daerah dapat dijadikan rujukan kebijakan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Untuk mendukung penelitian ini, kami akan menguraikan beberapa kajian teori sebagai alat analisis dalam menelaah vocational training dalam memutus rantai kemiskinan. Setidaknya ada tiga teori yang kami gunakan diantaranya;

1. Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi dalam diri manusia yang akan meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan pendapatan individu. Vocational training termasuk dalam bentuk investasi ini, karena memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat digunakan di dunia kerja. Dengan peningkatan keterampilan tersebut, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Pelatihan vokasional memberikan "modal manusia" berupa kompetensi teknis yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga memperbesar kemungkinan partisipasi dalam pasar tenaga kerja formal dan produktif.

2. Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Teori ini menekankan pada bagaimana individu atau kelompok yang terpinggirkan dapat memperoleh kekuatan untuk mengontrol kehidupan mereka melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya. Vocational training berperan sebagai alat pemberdayaan karena memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri kepada individu miskin atau kelompok rentan untuk mandiri secara ekonomi. Program pelatihan kerja memungkinkan masyarakat miskin untuk memiliki kontrol lebih atas pilihan ekonomi mereka, meningkatkan kemampuan bertahan hidup, dan menciptakan peluang usaha mandiri.

3. Teori Struktural Fungsionalisme

Dalam teori ini, setiap lembaga sosial (termasuk pendidikan dan pelatihan) memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Pendidikan vokasi dilihat sebagai mekanisme adaptasi yang menyiapkan individu untuk memenuhi kebutuhan sistem ekonomi. Ketika individu berhasil masuk ke pasar kerja, fungsi sosial dari pelatihan vokasional berjalan optimal dalam menjaga keseimbangan masyarakat, termasuk mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Vocational training menjadi alat integrasi sosial, menghubungkan individu dengan dunia kerja dan mengurangi beban ketimpangan ekonomi secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk memahami konteks judul dengan melihat penelitian atau pembahasan penelitian terdahulu. Dengan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan, penelitian ini dapat menggali efektivitas program vocational training, apa saja tantangan dan bagaimana praktik terbaik di berbagai negara sehingga dapat menjadi sumber rujukan dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi berbagai literatur yang relevan dengan judul. Untuk relevansi dan keakuratan data, maka penulis membatasi rentang waktu sumber data lima (5) tahun terakhir (2020-2025). Beberapa sumber data yang digunakan diantaranya; Dokumen kebijakan pemerintah, jurnal penelitian, dan berita atau artikel opini dari media massa.

Data penelitian dikumpulkan dengan beberapa alur yakni penentuan kata kunci untuk melakukan penelusuran pada data base atau sumber data yang ada. Selanjutnya menelusuri

sumber referensi, menyaring/menyeleksi referensi, mencatat dan mengolah data, dan menganalisis isi literatur.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik (thematic synthesis). Langkah dalam menganalisis data dimulai dari mengelompokkan isi literatur berdasarkan tema, topik, variabel, teori yang menjadi dasar penelitian. Setelah itu, membandingkan persamaan dan perbedaan isi literatur, kemudian menggabungkan informasi dari berbagai literatur menjadi narasi utuh, dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Litetarur Vocational training

Dari penelitian ini ditemukan beberapa data yang menjadi hasil penelusuran sumber kajian dalam pembahasan. Data tersebut dapat kami uraikan secara singkat sebagaimana berikut ini;

- 1) Penelitian yang dilaksanakan oleh Puri & Wicaksono (2023) mengungkapkan adanya kombinasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dapat meningkatkan upah bagi lulusan Diploma. Namun, lulusan SMK masih menghadapi stigma produktivitas rendah, yang mempengaruhi daya saing mereka di pasar kerja. Hal ini memberikan indikasi bahwa adanya korelasi antara keterampilan dengan upah yang diterima. Semakin tinggi keterampilan kerja yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula upah kerja yang akan diterimanya.
 - 2) Pada sumber lain (website Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 08 Januari 2024 Pukul 15:53) kami menemukan data bahwa salah satu langkah untuk mendukung pengentasan kemiskinan ditingkat daerah yaitu program pendidikan vokasi nonformal seperti Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang dilakukan oleh Bupati Demak dan berhasil lulus diterima pada indutsri sebanyak 188 dari 200 peserta ke industri setelah pelatihan. Keberhasilan ini didukung oleh kerja sama erat antara lembaga pelatihan dan dunia usaha, serta dukungan pemerintah daerah.
 - 3) Pada website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, memuat naskah siaran persnya dengan No: HM.4.6/83/SET.M.EKON.2.3/07/2019 tentang Pemerintah Dorong Revitalisasi dan Terobosan Pendidikan Vokasi Agar Sesuai Kebutuhan Industri yang dilaksanakan di Depok, 22 Juli 2019. Dalam dokumen tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen merevitalisasi pendidikan vokasi melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas pengajar, dan pengembangan sistem sertifikasi nasional. Upaya ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan permintaan pasar.
 - 4) Data berikutnya adalah hasil penelitian di Nepal oleh Chakravarty et al. (2020) menemukan bahwa program pelatihan vokasional meningkatkan peluang kerja non-pertanian sebesar 10–31% dan pendapatan bulanan, terutama bagi perempuan yang memulai usaha rumahan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan vokasional dapat memberdayakan kelompok rentan secara ekonomi.
 - 5) Sedangkan pada website koran digital di Vietnam (Viet Nam News, Friday, May 09 2025), memuat berita bahwa 90% peserta pelatihan vokasional tingkat menengah dan tinggi mendapatkan pekerjaan stabil dan pendapatan yang baik, yang membantu mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini menekankan
-

pentingnya pelatihan vokasional formal dalam strategi pengentasan kemiskinan.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait Vocational training

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020-2025), beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait dengan vocational training yang merupakan upaya untuk memutus rantai kemiskinan diantaranya;

- 1) Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2022 yang mengatur tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini diharapkan mampu menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, produktif, dan punya daya saing tinggi, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja di masa yang akan datang. Regulasi ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), serta lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Tujuannya adalah menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui pendekatan demand-driven.
 - 2) Kartu pekerja yang diluncurkan pada tahun 2020 dengan tujuan meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan vokasional berbasis digital. Sasaran utama dari program ini adalah pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pelaku usaha mikro. Upaya ini merupakan strategi bantuan sosial semi bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 secara ekonomi.
 - 3) Program kartu pekerja yang diluncurkan tahun 2020 berupa program bantuan biaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Pada sumber website East Asia Forum disebutkan bahwa orang yang menerima program ini mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar 10% dibanding dengan orang yang tidak mengikuti program ini. Dalam website Oxford Business Group menyebutkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau lebih dari 17 juta peserta di seluruh Indonesia pada tahun 2023.
 - 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menetapkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasional. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,4% pada 2019 menjadi 6,5–7,0% pada 2024 melalui peningkatan keterampilan kerja dan produktivitas masyarakat.
 - 5) Kementerian Ketenagakerjaan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) demi meningkatkan kualitas pelatihan kerja. Program ini menjangkau pengembangan kewirausahaan yang ada di masyarakat termasuk di lingkungan pesantren.
 - 6) Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Pada tahun 2023, program ini menargetkan 110.000 peserta, termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat miskin ekstrem.
 - 7) Program Skills for Prosperity (SfP) Indonesia. Program ini didukung oleh pemerintah Inggris dan International Labour Organization (ILO), program SfP fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor maritim. Program ini bertujuan meningkatkan akses pelatihan bagi kelompok rentan dan memperkuat keterlibatan industri dalam kurikulum pelatihan.
 - 8) Program Kementerian Sosial untuk Pemberdayaan dan Pelatihan. Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaksanakan program pelatihan vokasional bagi
-

kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.

- 9) Adanya Program Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu (PePADU) Plus di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah Provinsi NTB melalui Disnakertrans meluncurkan program PePADU Plus yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan dengan kebutuhan industri lokal. Program ini juga memberikan bimbingan usaha dan bantuan peralatan bagi peserta yang tidak langsung terserap di dunia kerja.
- 10) Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TVET). Pemerintah Indonesia telah mendapatkan dukungan dari perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yakni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) melalui proyek Technical Support and Research (TSR) 2.0, telah mengimplementasikan Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Dari kerjasama ini akhirnya berhasil terbentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) untuk memperkuat dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi di tingkat nasional. Selain itu, terbentuk tim Pengembangan Dewan Sektor Industri untuk memperkuat koordinasi dan pengembangan sektor industri, serta pemakaian teknologi terbaru seperti Virtual Reality (VR) dalam pendidikan dan pelatihan.

3. Hasil Kajian literatur

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pelatihan vokasional memiliki peran strategis dalam memutus rantai kemiskinan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Data dan temuan dari berbagai sumber menggambarkan adanya hubungan kuat antara keterampilan yang diperoleh dari pelatihan vokasional dan peningkatan kesejahteraan ekonomi individu. Berikut ini akan diuraikan pembahasannya kedalam beberapa poin sebagai berikut;

- 1) Hubungan Keterampilan dan Upah. Penelitian Puri & Wicaksono (2023) menemukan bahwa lulusan pendidikan vokasi khususnya pada jenjang Diploma dapat memperoleh upah tertinggi. Hal ini menandakan pentingnya kualitas pelatihan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Namun, masih terdapat stigma terhadap lulusan SMK yang dianggap kurang produktif, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu dan persepsi terhadap pendidikan vokasional juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani.
 - 2) Implementasi Program di Daerah. Contoh nyata dari keberhasilan pelatihan vokasional ditunjukkan oleh program PKK di Demak yang berhasil menyalurkan 188 dari 200 peserta ke dunia kerja. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal dan mendapat dukungan pemda, hasilnya akan lebih signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
 - 3) Komitmen Pemerintah dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong revitalisasi pendidikan vokasi melalui berbagai kebijakan seperti Perpres No. 68 Tahun 2022. Kebijakan ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri (demand-driven). Upaya ini diperkuat dengan penyusunan kurikulum adaptif, peningkatan kualitas pengajar, serta pengembangan sistem sertifikasi kompetensi.
-

- 4) Efektivitas Pelatihan di Luar Negeri. Pengalaman internasional mendukung efektivitas pelatihan vokasional. Studi di Nepal oleh Chakravarty et al. (2020) menunjukkan peningkatan pendapatan dan keterlibatan perempuan dalam kewirausahaan rumahan setelah mengikuti pelatihan. Sementara itu, di Vietnam, 90% peserta pelatihan vokasional tingkat menengah dan tinggi berhasil mendapatkan pekerjaan stabil, menegaskan kontribusi pelatihan vokasi dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
- 5) Dampak Program Nasional Terhadap Kemiskinan. Berbagai program seperti Kartu Prakerja, BLK menjadi BPVP, TKM, dan PePADU Plus membuktikan bahwa pelatihan vokasional efektif untuk meningkatkan keterampilan masyarakat rentan. Selain peningkatan pendapatan, program-program ini mendorong kemandirian ekonomi melalui jalur kewirausahaan. Kebijakan-kebijakan ini juga diarahkan pada kelompok marjinal seperti penyandang disabilitas dan masyarakat miskin ekstrem, menunjukkan pendekatan inklusif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- 6) Sinergi Multisektor dan Dukungan Internasional. Upaya revitalisasi pelatihan vokasional juga melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional seperti ILO, GIZ, dan pemerintah Inggris. Kolaborasi ini penting untuk mendukung pembentukan kebijakan yang berbasis praktik baik (best practices) internasional dan teknologi terkini seperti penggunaan Virtual Reality (VR) dalam pelatihan.

4. Efektivitas Program Vocational training

Dari hasil kajian literatur yang kami lakukan, maka kami menilai bahwa pelaksanaan program vocational training di Indonesia terbilang efektif. Hal tersebut dapat terlihat dari tiga sektor yaitu;

- a. Tercapainya peningkatan penghasilan dan meningkatnya keterampilan kerja bagi yang mengikuti program vocational training. Ini terbukti dari data yang termuat pada East Asia Forum pada tahun 2023, bahwa selama diluncurkannya program kartu pekerja pada tahun 2020 telah memberikan dampak positif berupa pendapatan peserta meningkat. Ada kenaikan pendapatan sekitar 10% dibandingkan dengan pekerja yang tidak bergabung dengan program kartu pekerja. Bukti berikutnya adalah dengan adanya program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) di Kabupaten Demak berhasil menyiapkan tenaga kerja yang profesional sehingga alumninya mampu terserap di dunia kerja sebanyak 94% (188 dari 200 peserta).
 - b. Terlaksananya pemberdayaan kelompok rentan. Dari literatur yang dikaji, yakni program dari Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diberi nama program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kami menemukan bahwa program vocational training terbilang efektif terlaksana sebab tidak hanya menyentuh masyarakat secara umum namun juga menjangkau dan memprioritaskan dua kelompok rentan yaitu masyarakat miskin ekstrim dan penyandang disabilitas. Yang dimaksud masyarakat miskin ekstrim adalah individu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dengan keterbatasan akses pekerjaan, pendidikan dan layanan dasar. Sementara yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau intelektual dan sensorik motoriknya yang rendah.
 - c. Terjalannya sinergi multi stakeholder. Vocational training tidak akan berhasil jika hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Kerjasama lintas sektor dapat menambah jaminan keberhasilan vocational training. Dari literatur yang dikaji, kami menemukan
-

bahwa terdapat kerjasama lintas sektor antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan pemerintah Jerman diwakili oleh Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) dengan dukungan dari GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – sebuah lembaga kerja sama pembangunan Jerman. Program yang dimaksud adalah Program TVET Revitalisasi (Technical and Vocational Education and Training), khususnya dalam bentuk TSR 2.0 (Technical Support and Research 2.0).

Dengan demikian, maka kerjasama lintas sektor tersebut mencakup tiga lembaga stakeholder yaitu pemerintah yang berperan sebagai perancang kebijakan dan penyedia regulasi, pihak industri sebagai pemakai tenaga kerja dan lembaga pelatihan yang bertindak sebagai penyelenggara pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

5. Tantangan Utama dalam Implementasi vocational training di Indonesia

Meskipun terbilang efektif dalam pelaksanaannya, kami juga dapat mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan vocational training di Indonesia. Tantangan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut;

- a) Terdapat kesenjangan kualitas dan akses. Hal ini terlihat dari belum semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas vocational training yang memadai apalagi di daerah yang sering disebut dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Selain itu, beberapa daerah masih terbatas jangkauan internetnya sehingga akses pelatihan digital, semisal pelatihan kartu pekerja menjadi terhambat dan tidak maksimal.
- b) Adanya stigma negatif terhadap program vocational training. Banyak masyarakat yang memandang bahwa pendidikan vokasi hanya menjadi pilihan kedua dan hanya untuk siswa yang punya capaian akademik yang dibawah rata-rata.
- c) Adanya ketidaksesuaian dengan kebutuhan industri. Salah satu data dari World Bank (2020) menyebutkan bahwa hanya sebagian kecil saja alumni dari pelatihan vokasi yang terserap dunia industri karena adanya keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- d) Program yang terkait dengan vocational training di beberapa kementerian terkesan tumpang tindih. Misalnya program yang ada di Kementerian Sosial, Ketenagakerjaan, dan Kemendikbud Ristek memiliki kemiripan. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi antar lembaga sehingga menghambat efektivitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan program secara nasional.

6. Rujukan kebijakan dari Praktik Terbaik Negara dan Daerah Lain

Untuk meningkatkan pelayanan program vocational training, maka dari penelitian ini kami mengajukan beberapa acuan bagi pemerintah, industri dan lembaga pelatihan yang merupakan praktik terbaik diantaranya;

- a. Kabupaten Demak dengan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK). Salah satu bentuk keberhasilannya adalah adanya integrasi antara pelatihan yang tepat guna, kemitraan dengan industri dan dukungan pemerintah daerah berupa kebijakan. Ini adalah contoh program vocational training yang efektif, relevan dan kontekstual sehingga dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.
-

- b. Negara Vietnam dimana keunggulannya terletak pada adanya keterpaduan antara kebijakan, praktik industri dan dukungan pendidikan sehingga sistem vokasinya lebih relevan, inklusif dan berorientasi hasil, terbukti dengan terserapnya lulusan vokasional sebesar 90% pada dunia kerja. Di Vietnam, pelatihan vokasional ini merupakan alat strategis untuk keluar dari kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya.
- c. Nepal yang juga berhasil meningkatkan pendapatan bagi lulusan pelatihan vokasi sebesar 31% khususnya pekerja perempuan dan industri rumahan. Kunci suksesnya terletak pada desentralisasi program pelatihan, dan pendampingan pasca pelatihan khususnya kelompok rentan.
- d. Jerman juga berhasil dalam vocational training sebab Jerman menerapkan sistem dual vocational training dalam arti calon pekerja mengikuti pendidikan dan magang pada industri.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka kami dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya;

1. Pelatihan vokasional berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan. Kajian literatur menunjukkan bahwa pelatihan vokasional efektif dalam meningkatkan keterampilan kerja, pendapatan, dan peluang kerja, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem.
2. Keterampilan yang relevan meningkatkan upah dan daya saing tenaga kerja. Penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara keterampilan hasil pelatihan vokasi dan peningkatan upah, terutama bagi lulusan pendidikan vokasi jenjang diploma.
3. Dukungan pemerintah terhadap vokasional training semakin kuat dan terstruktur. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis seperti Perpres No. 68 Tahun 2022, program Kartu Prakerja, transformasi BLK menjadi BPVP, dan program-program lintas kementerian lainnya untuk mendukung pelatihan vokasional.
4. Efektivitas pelaksanaan program terbukti melalui capaian nyata. Contoh keberhasilan seperti program PKK di Demak dan peningkatan pendapatan peserta Kartu Prakerja menunjukkan bahwa pelatihan vokasi berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.
5. Sinergi multisektor menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan baik dalam negeri maupun dengan mitra internasional seperti Jerman dan ILO memperkuat efektivitas dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan industri.
6. Tantangan masih dihadapi dalam implementasinya yang mencakup kesenjangan akses di daerah 3T, stigma negatif terhadap vokasi, ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, dan tumpang tindih antar program di berbagai kementerian.
7. Praktik terbaik dapat menjadi rujukan kebijakan nasional yaitu Praktik dari Kabupaten Demak, Vietnam, Nepal, dan Jerman menunjukkan bahwa pelatihan vokasional yang kontekstual, terintegrasi dengan industri, serta berorientasi pada hasil mampu memberikan dampak besar pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas nasional.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka disarankan agar pemerintah Indonesia, industri, serta lembaga pelatihan vokasional lebih memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program vocational training. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) melalui pembangunan infrastruktur

pelatihan yang merata serta memperkuat akses digital agar pelatihan daring seperti Kartu Prakerja dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan kampanye nasional untuk mengubah persepsi negatif terhadap pendidikan vokasi dengan menekankan prospek kerja dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan. Harmonisasi kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri harus dipercepat melalui keterlibatan aktif dunia usaha dan pembentukan Dewan Sektor Industri di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah juga perlu mengadopsi praktik terbaik dari negara seperti Vietnam dan Jerman, misalnya dengan memperkuat sistem pelatihan dual track dan mengembangkan program magang industri berbasis kompetensi. Terakhir, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih antar program serta untuk memastikan seluruh intervensi yang dilakukan berjalan sesuai arah strategis pengentasan kemiskinan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *RPJMN 2020–2024: Pengembangan SDM dan Penurunan Kemiskinan melalui Pendidikan Vokasi*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Strategi Nasional Pendidikan Vokasi: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha*. Diakses dari <https://vokasi.kemdikbud.go.id> (diakses 8 Januari 2024).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2019). *Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Siaran Pers No. HM.4.6/83/SET.M.EKON.2.3/07/2019*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Laporan Program Pemberdayaan dan Pelatihan Kelompok Rentan melalui Vocational Training*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemensos.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 269–280. Penelitian ini mengkaji berbagai strategi dan program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, termasuk peran pendidikan dan pelatihan vokasional.
- Puri, H., & Wicaksono, L. (2023). Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Kerja: Dampaknya terhadap Pendapatan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ketenagakerjaan*, 8(2), 113–127.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. (2023). *Talcott Parsons: Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Pustaka Kemendagri.
- Sriati. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Suhartini, T. (2023). Implikasi Kebijakan Pendidikan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi. *Jurnal Literasi Sosial*, 5(2), 110–120. Studi ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan pendidikan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi.
- Tim Penulis. (2023). *Sosiologi Modern: Teori Struktural Fungsional sampai Teori Hegemoni*. Jakarta: Penerbit Eureka.
- Tim Penulis. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Widina.
- Wajdi, M. Farid. (2013). *Indeks Modal Manusia: Konsep dan Pengukuran*. Jakarta: PPM School of Management.
- Prihadi, C. (2023, 15 December). How workforce training is helping Indonesia modernise its
-

- economy. Diakses pada 3 April 2025, dari <https://eastasiaforum.org/2023/12/15/how-workforce-training-is-helping-indonesia-modernise-its-economy/>
- S. Chakravarty, et al (2020). Vocational Training Programs and Youth Labor Market Outcomes: Evidence from Nepal. *Journal of Development Economics* 136, 71-110. https://arxiv.org/search/?query=Vocational+Training+Programs+and+Youth+Labor+Market+Outcomes%3A+Evidence+from+Nepal&searchtype=all&abstracts=show&order=-announced_date_first&size=50
- Viet nam News (2023, 24 Oktober). Vocational training key for sustainable poverty reduction. Diakses pada 2 April 2025, dari <https://vietnamnews.vn/society/1605589/vocational-training-key-for-sustainable-poverty-reduction.html>
-